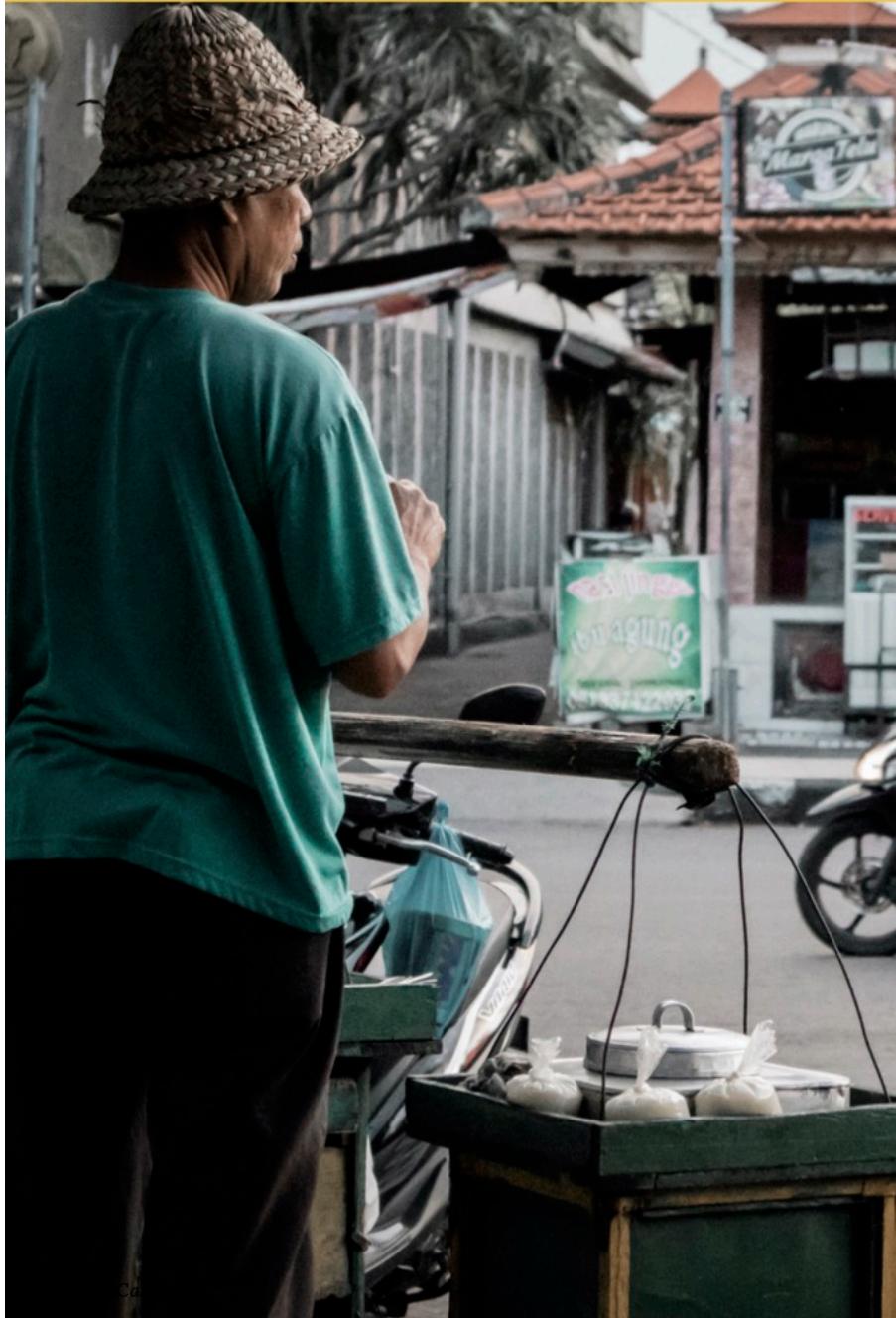


LABOR MARKET BRIEF



KEPALA LPEM FEB UI
Riatu M. Qibthiyah, Ph.D.

PIMPINAN REDAKSI
Muhammad Hanri, Ph.D.
(hanri@lpem-feui.org)

REDAKTUR PELAKSANA
Nia Kurnia Sholihah, S.E.
(nia.kurnia@lpem-feui.org)

EDITOR
Riatu M. Qibthiyah, Ph.D.

DAFTAR ISI

Perkembangan Upah Harian Buruh	2
Overview Perkembangan Kemiskinan di Indonesia	2
Overview Ketimpangan di Indonesia	4
Tinjauan Kebijakan: Upaya Pemerintah untuk Menghambat Laju Kemiskinan di Indonesia	5

RINGKASAN

Tingkat kemiskinan dan ketimpangan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan menekan laju pertumbuhannya menjadi salah satu tujuan pembangunan ekonomi suatu negara. Akan tetapi, pandemi COVID-19 membuat penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan dalam dekade terakhir menjadi kembali meningkat. Oleh karena itu, pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional berupaya memberikan jaring pengaman dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi masyarakat, terutama kelompok penduduk miskin dan rentan. Upaya ini cukup berhasil menahan angka kemiskinan dan ketimpangan untuk tidak meningkat terlalu tinggi pada tahun 2020 dan alokasi bantuan dilanjutkan pada tahun 2021.

PERKEMBANGAN UPAH HARIAN BURUH

BPS mencatat terjadi kenaikan rata-rata upah nominal harian buruh tani nasional sebesar 0,13% pada Desember 2020 dibanding upah nominal buruh tani November 2020 (Rp55.848) dan naik sebesar 2,19% dibandingkan dengan upah nominal buruh tani pada Desember 2019. Pola berbeda ditunjukkan rata-rata upah riil buruh tani pada Desember 2020 yang menurun sebesar 0,34% dibandingkan dengan upah riil buruh tani November 2020 (Rp52.556) serta menurun sebesar 0,43% dibandingkn Desember 2019. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan daya beli pendapatan buruh tani pada Desember 2020 dibandingkan dengan tahun dan bulan sebelumnya.

Pola yang sedikit berbeda ditunjukkan oleh upah nominal dan riil harian buruh bangunan (tukang bukan mandor) pada bulan Desember 2020. Dari upah nominal harian buruh bangunan, tercatat ada kenaikan sebesar 0,01% pada Desember 2020 dibanding upah nominal harian buruh bangunan pada November 2020 (Rp90.807) dan naik sebesar 1,84% dibandingkan pada Desember 2019. Di sisi lain, rata-rata upah riil harian buruh bangunan pada Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 0,44% dibandingkan November 2020 (Rp86.311). Akan tetapi, rata-rata upah nominal harian buruh bangunan meningkat sebesar 0,14% dibandingkan dengan Desember 2019. Oleh karena itu, terlihat bahwa terjadi penurunan daya beli pendapatan buruh bangunan pada Desember 2020 dibandingkan bulan sebelumnya tetapi terjadi kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

RATA-RATA UPAH HARIAN BURUH		Desember 2019	Desember 2020	
	Upah Nominal Harian Buruh Tani	54.723 rupiah/ hari	55.921 rupiah/ hari	▲ 2,19%
	Upah Riil Harian Buruh Tani	52.510 rupiah/ hari	52.331 rupiah/ hari	▼ 0,34%
	Upah Nominal Harian Buruh Bangunan	89.179 rupiah/ hari	90.816 rupiah/ hari	▲ 1,84%
	Upah Riil Harian Buruh Bangunan	85.807 rupiah/ hari	85.931 rupiah/ hari	▲ 0,14%

Gambar 1. Rata-rata Upah Harian Buruh

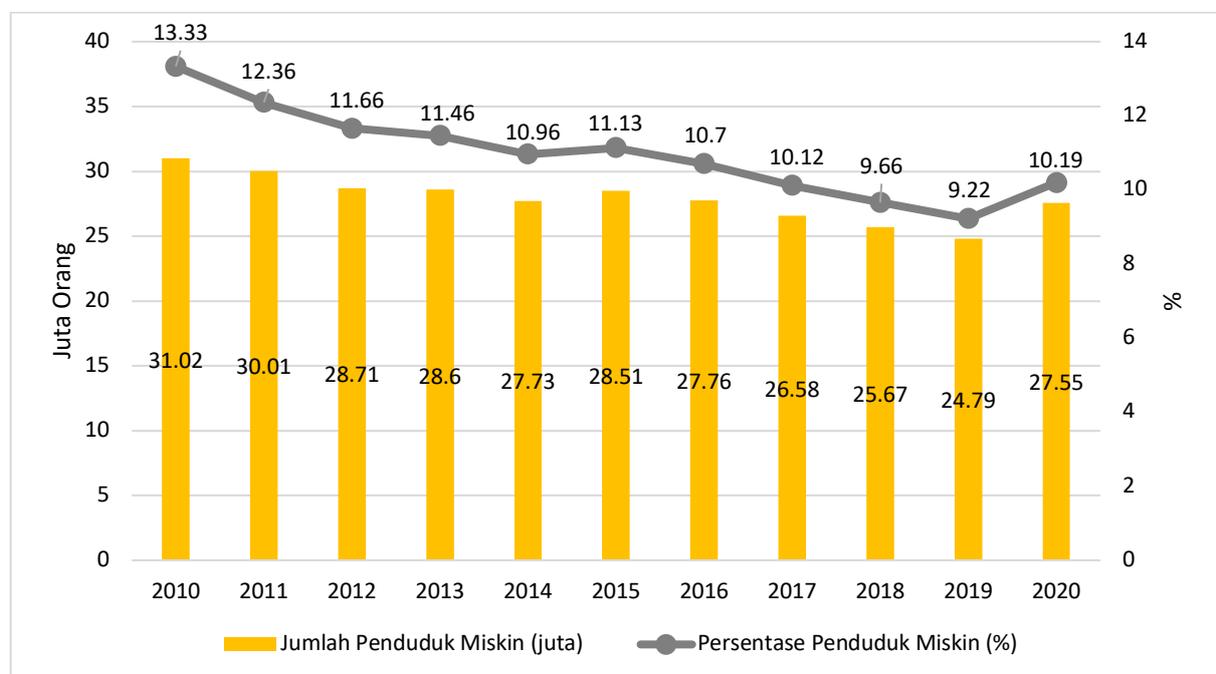
Sumber: BPS (2021)

OVERVIEW PERKEMBANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA

Tingkat kemiskinan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan menekan laju pertumbuhannya menjadi salah satu tujuan pembangunan ekonomi suatu negara. Tingkat kemiskinan dapat dicerminkan melalui penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan nonmakanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin). Berdasarkan data yang dihimpun dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) oleh BPS, garis kemiskinan itu sendiri mengalami kenaikan pada September 2020 dibandingkan dengan

September 2019 baik di perkotaan dan pedesaan. Secara total (pedesaan dan perkotaan), kenaikan garis kemiskinan dari September 2019 (440.538 rupiah/ kapita/ bulan) ke September 2020 (458.947 rupiah/ kapita/ bulan) adalah sebesar 4,18%.

BPS mencatat bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2020 mencapai 27,55 juta orang. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2020 (26,42 juta) dan September 2019 (24,79 juta). Besaran jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2020 ini menunjukkan peningkatan dibandingkan trend yang menurun pada kurun waktu 10 tahun terakhir sebelumnya. Secara umum, pada periode 2010–September 2019, tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan trend yang negatif secara nominal, kecuali pada September 2013 dan September 2015. Kenaikan harga bahan bakar minyak menjadi pemicu kenaikan harga barang kebutuhan pokok yang mendorong peningkatan jumlah penduduk miskin pada kedua periode tersebut. Perkembangan tingkat kemiskinan tahun 2010 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia¹

Sumber: BPS (2021)

Jumlah penduduk miskin pada September 2020 tercatat lebih besar di wilayah pedesaan (15,11 juta penduduk) dibandingkan dengan wilayah perkotaan (12,03 juta penduduk). Secara persentase penduduk miskin juga menunjukkan hal yang sama, yang mana persentase penduduk miskin di perkotaan tercatat sebesar 7,88% dan penduduk miskin di pedesaan sebesar 13,02% pada periode yang sama. Di level subnasional, provinsi yang tercatat memiliki persentase penduduk miskin paling besar adalah Provinsi Papua (26,80%) diikuti dengan Provinsi Papua Barat (21,70%)

¹ Tahun 2010 menggunakan data Maret 2010, tahun 2011-2020 menggunakan data September pada masing-masing tahun

dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (21,21%). Provinsi dengan persentase penduduk miskin terkecil adalah Provinsi Bali (4,45%).

Dimensi lain yang perlu menjadi perhatian dalam diskusi mengenai kemiskinan adalah sejauh mana tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan². Pada bulan September 2020, tercatat bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan September 2019. Indeks Kedalaman Kemiskinan meningkat sebanyak 0,25 poin dan Indeks Keparahannya Kemiskinan meningkat sebanyak 0,11 poin. Kedua indeks tersebut pada periode yang sama juga mencatatkan lebih tinggi di daerah pedesaan dibandingkan dengan daerah perkotaan.

Pada tahun 2020, baik jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, maupun tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagaimana yang telah diketahui bersama, salah satu penyebab utama peningkatan ini adalah karena adanya dampak pandemi COVID-19 yang menurunkan aktivitas ekonomi secara cukup menyeluruh. Pandemi yang berakibat pada penurunan tingkat permintaan masyarakat akan barang dan jasa serta dirupsi pada rantai nilai secara global. Hal ini mempengaruhi penurunan aktivitas bisnis yang kemudian mempengaruhi permintaan tenaga kerja sehingga mendorong peningkatan tingkat kemiskinan. Pada bulan Agustus 2020, BPS mencatat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah sebesar 7,07%. Angka ini meningkat jika sebesar 1,84 persen poin jika dibandingkan dengan Agustus 2019 (5,23%). Selain itu, sebanyak 14,28% penduduk usia kerja (29,12 juta orang) tercatat terdampak pandemi COVID-19 pada bulan yang sama. Sebanyak 24,03 juta penduduk di antaranya bekerja dengan pengurangan jam kerja (*shorter hours*) dan 2,56 juta penduduk yang lain menjadi pengangguran, sedangkan sisanya termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja (0,76 juta orang) dan penduduk sementara tidak bekerja (1,77 juta orang). Di sisi lain, persentase pekerja setengah penganggur tercatat sebesar 10,19% yang tercatat naik jika dibandingkan dengan periode Agustus 2019 (6,42%).

OVERVIEW KETIMPANGAN DI INDONESIA

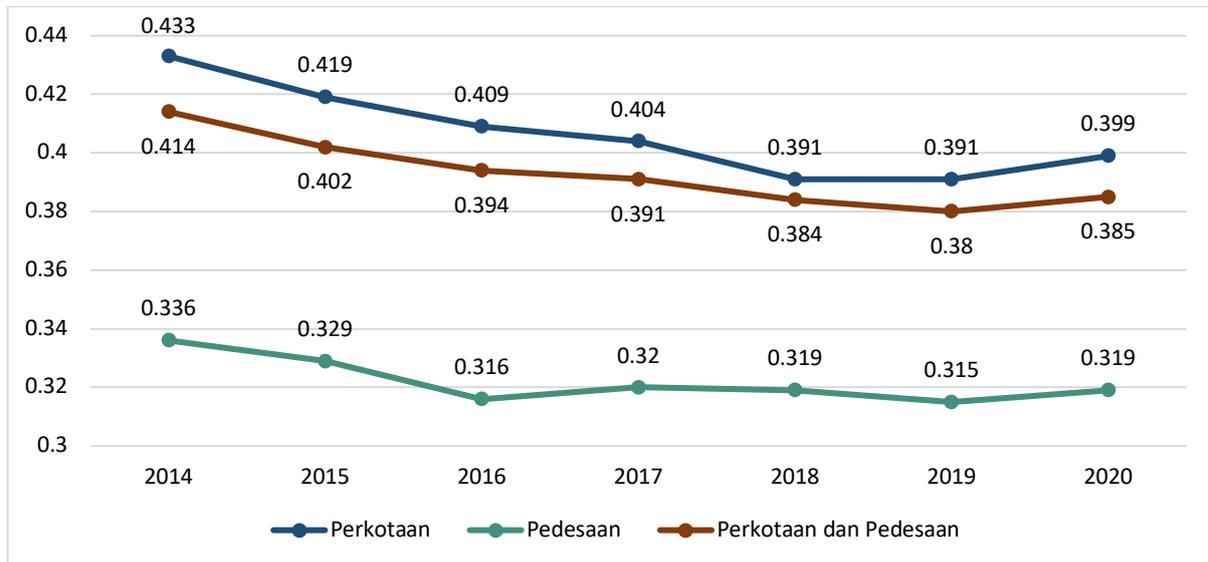
Salah satu indikator lain yang dapat memberikan gambaran mengenai kondisi kesejahteraan masyarakat adalah indikator ketimpangan yang dicerminkan melalui rasio gini³. Sejak tahun 2014, BPS mencatat bahwa rasio gini Indonesia secara nasional menunjukkan trend menurun selama kurun waktu lima tahun terakhir. Rasio gini di wilayah perkotaan tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah pedesaan dalam kurun waktu yang sama. Akan tetapi, trend ini menunjukkan peningkatan pada tahun 2020. Rasio gini pada September 2020 tercatat sebesar 0,385 yang mana meningkat sebesar 0,004 poin dibandingkan dengan September 2019.

Jika dilihat di level subnasional, Provinsi DI Yogyakarta merupakan provinsi dengan rasio gini tertinggi pada tahun 2020 (0,437) diikuti dengan Provinsi Gorontalo (0,406) dan Provinsi DKI

² Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

³ Rasio gini = 0 berarti bahwa pendapatan merata sempurna, artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya. Rasio gini = 1 artinya ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja.

Jakarta (0,4). Sedangkan provinsi dengan rasio gini terendah adalah provinsi Kepulauan Bangka Belitung (0,257) diikuti dengan Provinsi Maluku Utara (0,29). Rata-rata rasio gini di hampir seluruh provinsi di Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2020 dibandingkan dengan rasio gini pada tahun 2019.



Gambar 3. Perkembangan Rasio Gini Indonesia⁴

Sumber: BPS (2021)

TINJAUAN KEBIJAKAN: UPAYA PEMERINTAH UNTUK MENGHAMBAT LAJU KEMISKINAN

Karena pandemi COVID-19 berdampak cukup besar bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan, pemerintah berupaya untuk melakukan intervensi agar dampak ini tidak semakin meluas dan berkepanjangan. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2020 pemerintah meningkatkan besaran maupun jenis perlindungan sosial sebagai jaring pengaman dalam menjaga tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat. Kebijakan-kebijakan tersebut tertuang dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Keuangan, tercatat bahwa realisasi sementara program perlindungan sosial untuk rumah tangga mencapai Rp220,39 triliun di sepanjang 2020, lebih tinggi dari alokasi awal (Rp203,9 triliun). Bantuan untuk rumah tangga diberikan dalam bentuk perluasan penerima dan manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako, Bantuan Sembako Jabodetabek, Bantuan Sembako Tunai, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Bantuan Beras PKH, serta pemberian Bantuan Tunai Penerima Kartu Sembako, Subsidi Gaji/Upah, Kartu Pra Kerja, Diskon Listrik, Subsidi Kuota Internet untuk mendukung Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), Bantuan Subsidi Upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan dan tenaga pendidik honorer.

Di sisi lain, untuk mendorong perekonomian dari sisi supply, pemerintah juga memberikan bantuan kepada sektor usaha terutama untuk UMKM yang terdampak cukup besar akibat

⁴ Tahun 2010 menggunakan data Maret 2010, tahun 2011-2020 menggunakan data September pada masing-masing tahun

pandemic COVID-19. Pada tahun 2020, dukungan untuk UMKM telah disalurkan oleh pemerintah sebesar Rp112,4 triliun. Bentuk dukungan ini difokuskan agar UMKM tetap dapat melakukan aktivitas ekonomi dengan cara menopang permodalan dan *cash flow*. Harapannya, hal ini akan membantu agar UMKM tetap bertahan dan dapat melakukan *jump start* pada masa pemulihan ekonomi. Dukungan yang diberikan oleh pemerintah berupa penempatan dana, subsidi bunga, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), insentif PPh Final UMKM, penjaminan kredit, dan pembiayaan investasi LPDB. Bentuk bantuan dari pemerintah baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran ini secara tidak langsung juga bertujuan untuk menekan laju peningkatan angka kemiskinan, menekan angka pengangguran serta meningkatkan daya beli masyarakat dengan tujuan utamanya adalah memulihkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk melanjutkan upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19, pemerintah berencana untuk tetap memprioritaskan perlindungan sosial untuk kelompok miskin dan rentan sebagai bentuk ketahanan ekonomi masyarakat pada program Pemulihan Ekonomi Nasional tahun 2021. Sebagai contoh, bantuan sembako pada tahun 2021 ditargetkan menasar 18,8 juta KPM, dengan periode 12 bulan penyaluran, BST ditargetkan menasar 10 juta kelompok penerima manfaat (PKM) untuk periode Januari hingga April, dan PKH akan diberikan diberikan kepada 10 ribu KPM PKH, serta BST sebesar Rp12 triliun. Pemerintah melalui Kementerian Sosial tengah berupaya untuk bekerjasama dengan perbankan terutama dari Himbara (Himpunan Bank Negara) serta PT Pis untuk menyalurkan bantuan agar lebih akuntabel dan mudah menjangkau masyarakat dengan efektif dan efisien. Harapannya, bantuan yang dialokasikan pada tahun 2021 ini akan dapat membantu masyarakat dalam kelompok miskin dan rentan untuk bertahan dari dampak pandemi COVID-19 serta membantu pemulihan kondisi perekonomian secara umum.

Referensi

BPS. 2020. Berita Resmi Statistik, Januari 2021.

BPS. 2020. Profil Kemiskinan di Indonesia September 2020

BPS. 2020. Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia September 2020

<https://fiskal.kemenkeu.go.id/data/document/pressrelease/2021/SP-Kemiskinan.pdf>

<https://covid19.go.id/berita/perlinsos-berlanjut-di-2021-untuk-pemulihan-ekonomi-nasional>

<https://covid19.go.id/p/berita/program-pemulihan-ekonomi-nasional-capai-realisisasi-lebih-dari-rp-500-triliun>

<https://nasional.kontan.co.id/news/tiga-program-perlindungan-sosial-dilanjutkan-di-2021>

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210215184509-532-606536/sri-mulyani-tambah-dana-pemulihan-ekonomi-2021-jadi-rp688-t>

Sumber Gambar

Halaman Cover : Photo by Canva

Halaman 2 : Icons by Canva